

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Baqarah ayat 282

B. Buku dan Jurnal

Adjie, H. 2008. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

_____. 2009. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT Refika Aditama.

_____. 2013. *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.

_____. 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Ali, A. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.

_____. 2010. *Menguak Teori Hukum (legal theory) an Teori Peradilan (judicial prudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence) Vol.1 Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Ali, Z. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Anshori, A. G. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.

A.Pitlo. 1986. *Pembuktian dan Daluwarsa Intermedia*. Jakarta: Alih Bahasa M. Isa Arief Intermedia.

Asikin dan Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bintarto, R. 1977. *Pengantar Geografi Kota*. Yogyakarta: Spring.

Ekatjahjana, W. 2008. *Pembentukan Peraturan Perundang Undangan*. Bandung: Citra Aditia.

et.al, A. S. 2001. *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat yang demokratis: Sebuah Panduan untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang*. ELIPS.

Hadjon, P. M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT.Bina Ilmu.

- Halim, H. 2009. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian teoritis & Praktis (Disertasi Manual Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris)*. Kencana Preneda Media group.
- Hamzah. Oktober 1989. *Tanggapan terhadap Makalah yang berjudul Kekuatan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat bukti*. Media Notariat Nomor 12-13 Tahun IV.
- Handoko, W. 2014. *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Harahap, M. Y. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HR, R. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada.
- Hs, S. M. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Huberman dan Miles. 1992. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Huda, N. 2011. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusamedia.
- Kamaroesid, H. 2016. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Edisi Pertama, Mitra Wacana Media.
- Kansil, C. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kelsen, H. 1945. *General Theory of Law and State*. New York: Russel & Russel.
- Kohar, A. 1984. *Notaris Berkomunikasi*. Bandung: Alumni.
- Murtir, J. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Gudang Penerbit.
- Mertokusumo, S. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cetakan ketigapuluh, PT Remaja Rosdakarya.
- M. Ali Safaat dan Jimly Asshiddiqie. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Notodisoerjono, R. S. 1993. *Hukum Notariat Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Otto, J. M. 2006. *terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Revika Aditama.

- Prof. Drs. Widjaja, H. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Putra, A. S. 2015. *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi R.I.
- Rifiani, H. S. 2013. *Prinsip- Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- R. Tjitro Sudibio dan R. Subekti. 1980. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Soeroso. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sitanggang, V. M. 1993. *Gross Akta dalam Pembuktian dan Eksekus*. Jakarta: Rinika Cipta.
- Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Setiawan. 1995. *Hak Ingkar Dari Notaris dan hubungannya dengan KUHP Suatu Kajian uraian yang disajikan dalam Kongres INI*, (p. 2). Jakarta.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- _____. 1999. *Beberapa Masalah Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerojo, H. 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Srimamudi dan Soerjono Soekanto. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.
- Subekti. 1977. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: BPHN.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharjono. 1995. Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum. *Varia Peradilan XI Nomor 123*, 128.
- Sunggono, B. 1997. *Metodologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulchan, A. 2018. *Buku Catatan Materi Teori Hukum dan Penemuan Hukum Notaris*.
- Syahrani, R. 1985. *Seluk beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Subekti. 1980. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.

- Sumpeno, W. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu, Edisi Kedua*. Banda Aceh: Reinforcement Action and Development.
- Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiarto, U. S. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shidarta, L. J. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Sidharta, L. R. 1994. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Tobing, G. L. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Widiyanto Ari, Sukarni dan Sulchan Achmad. 2017. *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*. Kendal: SINT Publishing.
- Wiriadinata, W. 2013. *Moral dan Etika Penegak Hukum, CV Vilawa*. Bandung: CV Vilawa.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
- Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).
- Peraturan Menteri Desa No.4 Tahun 2015 Tentang *Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

D. Lain-lain

<https://indonesiana.tempo.co/read/110807/2017/04/25/Pembangunan-Desa-Menurut-UU-No-6-Tahun-2014>, diakses pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 14.00.